

ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI ACEH PERIODE 2002-2015

Abstract

This study aims to determine the level of income inequality among districts in Aceh Province period 2002-2015. 23 districts / municipalities in Aceh province with the most equitable income per capita with Williamson coefficient below 0.05 is Aceh Singkil, South Aceh, Sabang, Langsa, Subulussalam, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Bireuen and Aceh Barat Daya. The second order of the District / State level income is fairly evenly evenness and has a value of between .05-.09 coefficient Williamson is Simeulue District, East Aceh, Pidie, North Aceh, Aceh Jaya and Pidie Jaya. Third-placed Regency / City and evenness of their income level is uneven and has a coefficient of 0.10 is above Williamson East Aceh, Lhokseumawe and Banda Aceh. Balance development across the county must be maintained in order to avoid differences in economic progress between districts will ultimately have an impact on the level of welfare of each district.

Rosti Maidar

*Magister Ilmu Ekonomi, Program
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
rostimaidar@gmail.com*

Raja Masbar

*Staf Pengajar Fakultas Ekonomi
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Raja.masbar53@gmail.com*

Muhammad Nasir

*Staf Pengajar Fakultas Ekonomi
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
nasirmsi@yahoo.com*

Keywords:

*Ketimpangan pendapatan,
jumlah penduduk*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi didalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Indonesia yang kaya dengan potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan (hasil bumi) maupun yang tidak terbarukan (hasil tambang dan mineral). Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola seoptimal mungkin, dengan meningkatkan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah tinggi dan mengurangi ekspor bahan mentah. Indonesia juga memainkan peran yang makin besar di perekonomian global.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh setiap negara di dunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut, yang salah satu indikatornya adalah Pendapatan Nasional per kapita (GNP per kapita). Namun demikian pertumbuhan GNP per kapita yang cepat tidak secara otomatis menambah atau memperbaiki tingkat hidup rakyat banyak. GNP saja tidak cukup menjadi indikator satu-satunya untuk kemajuan pembangunan, tetapi yang lebih penting bagaimana hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh segenap penduduk di negara tersebut. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pendapatan atau GNP tersebut bagi semua penduduk. Pemerataan pendapatan bermakna hasil pembangunan telah dapat dinikmati oleh semua penduduk, termasuk yang berada pada lapisan paling bawah.

Distribusi pendapatan ini tidak hanya pada tingkat nasional saja, tetapi juga disetiap daerah. Keberhasilan pembangunan daerah menjadi landasan yang baik bagi keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini karena pembangunan nasional tidak terlepas dari kinerja pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah akan memberikan korelasi yang cukup besar pada peningkatan hasil pembangunan nasional.

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satu aspek tersebut adalah laju pertumbuhan ekonomi. Walaupun kenyataannya laju pertumbuhan ekonomi bukan satu-

satunya ukuran yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan, tetapi dapat digunakan secara umum dan masih dipakai oleh para ahli.

Banyak negara sedang berkembang termasuk Indonesia masih beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi harapan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahap awal akan menyebabkan peningkatan ketimpangan pembagian pendapatan. Kondisi ini sesuai dengan kenyataan empiris di negara-negara sedang berkembang yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat pada umumnya disertai dengan pembagian pendapatan yang makin timpang (Wie, 1981:2).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi yang tinggi ternyata belum menciptakan pendistribusian pendapatan yang merata, sehingga kondisi ini seolah-olah hanya memberikan manfaat bagi segolongan kecil masyarakat yang memiliki akses kekuasaan politik dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian mengenai hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dengan pembagian pendapatan seperti yang dirintis oleh Simon Kuznets yang lazimnya disebut dengan teori Kuznets. Kuznets mengamati hubungan antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang digambarkan dalam suatu kurva berbentuk ∞ terbalik. Negara yang sedang berkembang pada tahap awal pembangunan cenderung mengalami ketimpangan pembagian pendapatan yang makin memburuk, kemudian ketimpangan tersebut akan berkurang pada tahap pembangunan selanjutnya (Hasibuan, 2003: 206).

Kajian yang banyak dilakukan menggunakan data antar lokasi (krat silang) dan antar waktu (time series). Namun untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, perlu menggabungkan kedua jenis data tersebut menjadi suatu data yang cukup mewakili, yang dikenal dengan istilah pooling technique. Untuk mencapai tujuan ini perlu dilakukan pengujian terhadap kesesuaian data tersebut untuk digabung. Penggabungan ini memenuhi syarat apabila koefisien dan kemiringan (slope) di semua daerah sama (Gujarati. 2009 : 499).

Masalah ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan merupakan suatu masalah pokok yang selalu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Oleh sebab itu penghapusan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi mutlak diperlukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apabila pemerintah tidak secara aktif melakukan campur tangan dalam kegiatan ekonomi, maka kegiatan perekonomian akan diatur oleh mekanisme pasar dan kemudian memberikan dampak negatif bagi pembangunan selanjutnya yaitu melebarnya jurang kesejahteraan dari masa ke masa antara daerah kaya dengan daerah miskin sebagai akibat dari kegiatan ekonomi daerah kaya lebih lancar dibandingkan dengan daerah miskin (Myrdal, 1975 : 26). Dengan demikian pembangunan ekonomi

lebih cepat berlaku di daerah yang lebih maju, sehingga menimbulkan disparitas pendapatan dan tingkat kemiskinan proporsional dengan majunya tingkat pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Untuk dapat memperkecil ketimpangan pendapatan antara masyarakat, maka investasi harus lebih banyak diarahkan kepada proyek-proyek yang ada hubungannya dengan masyarakat miskin, seperti pendidikan, kesehatan, kegiatan pertanian dan sebagainya sehingga ketimpangan yang terjadi tidak semakin melebar. Keberhasilan pembangunan dengan laju pertumbuhan ekonomi melebihi laju pertumbuhan penduduk, belum merupakan suatu tolok ukur terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu merata atau tidaknya tingkat kemiskinan. Tetapi keberhasilan pembangunan dengan laju pertumbuhan yang tinggi hanya melambangkan tolok ukur kemajuan ekonomi secara kuantitatif saja (Sagir, 2002 : 20).

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spritual. Isu pemerataan pembangunan, baik dalam lingkup regional maupun nasional, akhir-akhir ini telah banyak mendapatkan perhatian dan dibicarakan dalam berbagai kesempatan. Pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di suatu daerah, perluasan lapangan kerja, meratakan pembagian pendapat masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tertier.

Dengan kata lain bahwa daerah yang memiliki produksi yang rendah kurang mendapat kesempatan sehingga tidak mendapatkan manfaat yang tercermin dalam distribusi pendapatan yang memadai. Perbedaan manfaat yang dinikmati daerah tersebut menimbulkan masalah kemiskinan. Ketimpangan pendapatan dalam suatu perekonomian merupakan fenomena yang terjadi di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Sebagai suatu permasalahan dalam pembangunan, ketimpangan tidak dapat dihilangkan secara sempurna. Dengan kata lain bahwa ketimpangan pendapatan akan tetap ada baik pada golongan keluarga atau masyarakat, maupun antar daerah dalam suatu wilayah tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan yang diterima oleh golongan masyarakat atau keluarga ataupun daerah secara total, ditentukan oleh kemampuan masing-masing golongan atau daerah, sedangkan kemampuan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan kemampuan ini terjadi karena banyaknya faktor yang mempengaruhi misalnya : pendidikan dan keterampilan, lingkungan, kesehatan, sturktur umur, sumber wilayah atau potensi wilayah itu sendiri, luas daerah, pemerintahan, kebudayaan, politik dan lain-lain.

Oleh karena itu ketimpangan pendapatan antar daerah atau golongan masyarakat adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari selama masih ada perbedaan kemampuan dan faktor-faktor yang berpengaruh tersebut. Sehingga yang menjadi perhatian disini adalah usaha untuk mengurangi ketimpangan yang terlalu besar melalui penelolaan faktor-faktor dan sumber daerah secara optimal. Dengan demikian akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik disertai dengan pemerataan pendapatan yang baik pula.

TINJAUAN TEORITIS

Koefisien Williamson yang dihitung oleh Daneire membuktikan bahwa ketimpangan pendapatan antar provinsi di Thailand semakin meningkat. Ternyata *Bangkok Metropolitan Region* (BMR) merupakan penyebab utama terjadinya peningkatan ini. (Daneire 2006 :379). Temuan Daneire ini mendukung hasil kajian yang juga menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Thailand hanya bertumpu di BMR.

Adelman dan Morris (Arsyad 1992 : 174), mengatakan bahwa yang dapat menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi, pertambahan pendapatan uang tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari tenaga kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukaran, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Ada beberapa factor yang menentukan ketimpangan antar wilayah, antar lain yaitu (Syafrijal, 2008):

a. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relative murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah.

b. Perbedaan Kondisi Demografis

Faktor lainnya yang juga mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur penduduk, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi etenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografisnya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relative rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan

pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

d. Kosentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya kosentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat kosentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kosentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena adanya sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi kosentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

e. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi jika sebaliknya dimana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan perkapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh yaitu pada semua kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Aceh mulai dari Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat daya, Gayo lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe, Bener meriah, Pidie Jaya dan Subulussalam. Dalam melihat ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Provinsi Aceh maka penulis hanya membatasi terhadap pendapatan per kapita dan jumlah penduduk masing-masing kabupaten tersebut yang diukur periode 2002- 2015.

Data yang digunakan di dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data pendapatan per kapita, dan Produk Domestik Regional Bruto yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Pustaka Universitas Syiah Kuala dan sejumlah laporan dan literatur terutama dari beberapa dinas dan instansi terkait yang berkaitan dengan topik penelitian seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dianalisis dari tahun 2002 sampai tahun 2014.

Untuk melihat arah ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi digunakan Formula Koefisien Williamson, yaitu (Azis: 1994 : 106):

$$V_w = \sqrt{[\sum(Y_i - Y)^2 F_i / n]} / Y$$

Dimana :

V_w = Koefisien Williamson, nilai berkisar antara 0 dan 1

Y_i = Pendapatan per kapita kabupaten i

Y = Pendapatan per kapita Provinsi Aceh

n = Jumlah penduduk seluruh Provinsi Aceh

F_i = Jumlah penduduk kabupaten i

Pembangunan wilayah dinilai merata jika nilai Koefisien Williamson sama dengan nol atau mendekati angka nol. Demikian pula sebaliknya, ketimpangan pembangunan akan wujud jika nilai koefisien semakin menjauhi nol. Terjadinya ketimpangan juga dapat ditunjukkan melalui arah aliran dari koefisien dari tahun ke tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antara Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh digunakan formula Koefisien Williamson. Dari hasil penelitian diperoleh Koefisien Williamson seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Koefisien Williamson Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2002-2015

Kabupaten/Tahun	K o e f i s i e n W i l l i a m s o n														
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata
Simeulue	0,042	0,042	0,059	0,074	0,065	0,077	0,075	0,071	0,069	0,069	0,067	0,067	0,065	0,065	0,065
Aceh Singkil	0,000	0,009	0,011	0,035	0,047	0,048	0,045	0,042	0,041	0,041	0,045	0,043	0,042	0,041	0,035
Aceh Selatan	0,045	0,027	0,005	0,005	0,046	0,016	0,009	0,006	0,002	0,003	0,007	0,011	0,011	0,007	0,014
Aceh Tenggara	0,031	0,086	0,097	0,076	0,075	0,084	0,081	0,075	0,071	0,070	0,071	0,073	0,074	0,071	0,074
Aceh Timur	0,241	0,195	0,066	0,112	0,015	0,248	0,250	0,251	0,252	0,253	0,016	0,014	0,016	0,009	0,138
Aceh Tengah	0,072	0,097	0,015	0,018	0,062	0,007	0,000	0,005	0,008	0,008	0,002	0,000	0,000	0,004	0,021
Aceh Barat	0,082	0,051	0,009	0,014	0,105	0,009	0,015	0,021	0,023	0,024	0,015	0,016	0,015	0,021	0,030
Aceh Besar	0,018	0,006	0,019	0,052	0,015	0,009	0,018	0,026	0,029	0,031	0,012	0,014	0,012	0,020	0,020
Pidie	0,091	0,074	0,038	0,015	0,086	0,111	0,102	0,093	0,088	0,089	0,094	0,096	0,095	0,092	0,083
Bireuen	0,055	0,032	0,017	0,003	0,036	0,015	0,003	0,007	0,014	0,014	0,007	0,005	0,005	0,011	0,016
Aceh Utara	0,017	0,021	0,046	0,035	0,005	0,258	0,175	0,115	0,079	0,071	0,039	0,035	0,035	0,043	0,070
Aceh Barat Daya	0,055	0,046	0,039	0,022	0,030	0,042	0,038	0,034	0,031	0,031	0,034	0,034	0,034	0,032	0,036
Gayo Lues	0,042	0,035	0,035	0,040	0,003	0,031	0,028	0,024	0,022	0,022	0,026	0,024	0,022	0,022	0,027
Aceh Tamiang	0,006	0,026	0,020	0,063	0,023	0,056	0,052	0,049	0,048	0,048	0,053	0,055	0,054	0,051	0,043
Nagan Raya	0,079	0,068	0,022	0,041	0,048	0,048	0,049	0,051	0,050	0,051	0,006	0,006	0,006	0,010	0,038
Aceh Jaya	0,073	0,065	0,035	0,034	0,004	0,126	0,126	0,126	0,123	0,122	0,064	0,060	0,061	0,058	0,077
Bener Meriah	0,046	0,033	0,032	0,020	0,027	0,016	0,013	0,010	0,009	0,007	0,013	0,011	0,012	0,008	0,018
Pidie Jaya	0,091	0,083	0,064	0,071	0,075	0,059	0,053	0,048	0,042	0,043	0,046	0,046	0,045	0,043	0,058
Banda Aceh	0,044	0,069	0,076	0,178	0,166	0,223	0,234	0,243	0,246	0,252	0,235	0,239	0,229	0,249	0,192
Sabang	0,009	0,024	0,013	0,009	0,000	0,011	0,014	0,018	0,020	0,019	0,016	0,020	0,023	0,022	0,016
Langsa	0,003	0,018	0,009	0,027	0,041	0,028	0,024	0,018	0,015	0,015	0,020	0,021	0,020	0,017	0,020
Lhokseumawe	0,063	0,087	0,138	0,106	0,079	0,150	0,185	0,182	0,192	0,193	0,183	0,190	0,198	0,198	0,153
Subulussalam	0,033	0,028	0,041	0,046	0,029	0,057	0,055	0,053	0,049	0,048	0,051	0,048	0,047	0,047	0,045

Sumber : BPS NAD, Aceh Dalam Angka, 2006 (data diolah)

Dari Tabel 1 menggambarkan bahwa keseimbangan pendapatan antara Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh secara rata-rata selama periode 2002-2015 menuju pemerataan. Namun diantara 23 Kabupaten/kota di Provinsi Aceh tersebut yang paling merata pendapatan per kapitanya dengan nilai koefisien Williamson dibawah 0,05 adalah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Selatan, Sabang, Langsa,

Subulussalam, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Bireuen dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kemudian Kabupaten/Kota yang tingkat pemerataan pendapatannya cukup merata dan memiliki nilai koefisien Williamson antara 0,05-0,09 adalah Kabupaten Simeulue, Aceh Tenggara, Pidie, Aceh Utara, Aceh Jaya dan Pidie Jaya. Sementara Kabupaten/Kota yang tingkat pemerataan pendapatannya tidak merata dan memiliki nilai koefisien Williamson diatas 0,10 adalah Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh.

Dari hasil penemuan diatas menggambarkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang memiliki pendapatan per kapita lebih besar ternyata pendapatran per kapitanya masih belum merata, seperti Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang paling merata pendapatan per kapita dengan nilai koefisien Williamson dibawah 0,05 adalah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Selatan, Sabang, Langsa, Subulussalam, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Bireuen dan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- b. Urutan kedua Kabupaten/Kota dengan tingkat pemerataan pendapatannya cukup merata dan memiliki nilai koefisien Williamson antara 0,05-0,09 adalah Kabupaten Simeulue, Aceh Tenggara, Pidie, Aceh Utara, Aceh Jaya dan Pidie Jaya.
- c. Urutan ketiga Kabupaten/Kota dengan tingkat pemerataan pendapatannya tidak merata dan memiliki nilai koefisien Williamson diatas 0,10 adalah Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh.

Saran

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dimbil beberapa saran yaitu :
- b. Keseimbangan pembangunan antar Kabupaten harus dipertahankan agar tidak terjadi perbedaan kemajuan ekonomi antar Kabupaten yang pada akhirnya juga akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat masing-masing kabupaten.
- c. Setelah adanya otonomi khusus saat ini maka diharapkan kepada pemerintah daerah dapat mempertahankan pembangunan yang merata dan seimbang sehingga tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah dengan demikian akan meningkatkan tingkat kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Djakfar., (2003). Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Dalam Proses Pertumbuhan Nasional Menghadapi Nuansa Globalisasi (Sebuah Studi Kasus di Indonesia), **Jurnal Ilmu Sosial Bidang Ekonomi. Vol 5 No.1**
- Putu I Gede Iwan Trisna Jaya (2004). Disparitas Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. **TEMA**, Volume 5, Nomor 1, Maret 2004
- Arsyad, L., (1992). **Ekonomi Pembangunan**, Edisi ke-2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Azis, Iwan Jaya, (1994). **Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasi di Indonesia: Teknik Perencanaan Pembangunan Masa Depan di Indonesia: Diperlukan Kerangka Baru dengan Memasukkan Dimensi Regional**, LPFI-UI, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, (2000). **Penjelasan Perhitungan Penduduk Miskin Provinsi Daerah Istimewa Aceh.**
- _____, (1999). **Pendapatan Regional Propinsi di Indonesia**, Jakarta.
- _____, (1999). **Indikator Kesejahteraan Masyarakat**, Biro Pusat Statistik Jakarta-Indonesia.
- _____. (1999). **Laporan Perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Aceh.**
- _____. (1998). **Indikator Kesejahteraan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.**
- _____. (1996-1999). **PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha**, Jakarta-Indonesia.
- _____. (1989). **Produk Domestik Bruto Propinsi-propinsi di Indonesia**. BPS. Jakarta
- Badan Perencanaan Nasional, (1995). **Pembangunan dalam Angka**, BAPPENAS Jakarta.
- Boediono, (2002). **Teori Pertumbuhan Ekonomi**, Edisi 1, BPFE-Yogyakarta.
- Chang, J.Y., and R. Ram, (2000). "Level of Development, Rate of Economic Growth, and Income Inequality," **Economic Development and Cultural Change Vol, 48 No. 4 July 2000, 787-799.**
- Chenery, H, H.S. Ahluwalia, C.L.G. Bell, J.H. Duloy, and R. Jolly, (1981). **Redistribution With Growth**, Oxford University.
- Daneire, A., (2006) **Growth, Iequality and Poverty in South-Easth Asia : The Case of thailand**, Third World planning Review.
- Froyen, R.T., (1996). **Macroeconomics**, Prentice Hall International, New Jersey.
- Ghatak, S., (1995). **Introduction to Development Economics**, Third Edition, Cornwall, London.
- Hasibuan, N., (2003). **Pemerataan Pembangunan Ekonomi**, Cetakan Pertama, Universitas Sriwijaya (UNSRI), Palembang.
- Myrdal. (1975). **Economic Theory dan Under Development in Region**. London Matheun.
- Partadiredja, Ace (2002), **Perhitungan Pendapatan Nasional**, LP3ES, Jakarta.

- Sagir, Suharsono. (2002). **Kesempatan Kerja, Ketahanan Nasional dan Pembangunan Manusia Seutuhnya**. Alumni. Bandung.
- Sultan dan Jamzani Sodik (2010). Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional Di Diy-Jawa Tengah Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Periode (2000-2004). **Buletin Ekonomi** Vol. 8, No. 1, April 2010 hal 1-70.
- Susanti, Hera, M. Ikhsan, dan Widyanti, (2005). **Indikator-indikator Makroekonomi**, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sutrisno Adi (2012). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010. **Economics Development Analysis Journal**. ISSN 2252-6560
- Sutawijaya Adrian (2008). Analisis Tingkat Pertumbuhan Dan Disparitas Antar Daerah Pada Era Otonomi Daerah.
- Todaro, M.P, (2008). **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, Alih Bahasa oleh Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A, Erlangga, Jakarta.
- Wie Thee Kian, (1981). **Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan**, LP3ES, Jakarta.